

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, SM, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Edisi /Cetakan: Cet. 4, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi dan Jaksa*. Cetakan 1. Pustaka Yustisia. Jakarta, hlm. 119.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahamn dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 1977, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmasir (Normatif)*, (Surabaya: Yudika, Majalah FH UNAIR, No. 16 tahun IX Nop-Des. 1994), hal. 6. Dikutip Suparto Widjoyo, *Karakter Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Cet. 1, Airlangga University Press. Surabaya.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasjidi, Lili dan Bagus Wiyasa Putra, Ida, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung.

Redi,Ahmad, Dr, 2007, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsuddin, M, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerodibroto, R. Soenarto, 2003, *KUHP dan KUHPA*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____,1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sugandhi, R, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supandji, Hendarman, 2007, *Model Penegakan Hukum di Daerah, Persoalandan Implementasinya*, Pontianak.

Suprpto. Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundangundangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, Cet 2, UII Press, Yogyakarta.

Utrecht, E dan Saleh Djindang, Moh, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Cet. Ke-11, Jakarta.

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 32.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694, LL Setkab: 3 HLM).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999/ Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .3874, LL SETNEG: 15 HLM).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001/ Nomor 134, TLN NO. 4150, LL SETNEG: 13 HLM).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234, LL SETNEG: 6 HLM).

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011/No. 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, LL SETNEG: 51 HLM).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/ PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983/Nomor.36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3258, LL DITJENPP: 10 HLM).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145, LL SETNEG : 11 HLM).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 453).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. (Kejaksaan RI Tahun 2010 Nomor 345.01 Per).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 999).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014

C. Surat Edaran

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi. (Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum Kejaksaan Agung).

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk melelang benda/barang sitaan yang rusak atau memerlukan biaya penyimpanan tinggi. (Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum Kejaksaan Agung Nomor 15/247).

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang akan digunakan untuk kepentingan Kejaksaan. (Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum Kejaksaan Agung Nomor 15/246).

D. Surat Keputusan

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK).

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Kep-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK).

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK).

E. Karya Ilmiah

Hartono, Bambang, 2011, *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Suparni, Ninik Dkk, 2017, *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan*, Jakarta.

F. Hasil Wawancara.

Sulaiman Nahdi, Syarief.,(Kepala Sub Direktur Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana pencucian Uang/ Jaksa Penyidik), 2022, *Lelang Barang Bukti Pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Putusan Inkracht Van Gewijsde*, Wawancara, 05 Januari 2022.

G. Internet

Ari wibowo, Eko, 2021, 854 Bidang Tanah Milik Benny Tjokro Disita Jadi Barang Bukti Kasus Asabri, <https://nasional.tempo.co/read/1438624/854-bidang-tanah-milik-benny-tjokro-disita-jadi-barang-bukti-kasus-asabri>, diakses 11 September 2021.

Hafil, Muhammad, 2021, Pakar: Penyitaan Aset Harus Terkait Kejahatan Korupsi, <https://www.republika.co.id/berita/qxkj6d430/pakar->

penyitaan-aset-harus-terkait-kejahatan korupsi diakses 21
September 2021.

Idris, Muhammad, 2021, Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan
Negara Rp 23,7 Triliun,
[https://money.kompas.com/read/2021/02/03/030400326/ini](https://money.kompas.com/read/2021/02/03/030400326/ini-kronologi-korupsi-asabri-yang-merugikan-negara-rp-23-7-triliun)
kronologi-korupsi-asabri-yang-merugikan-negara-rp-23-7-triliun
diakses 11 September 2021.

Supriatna, Iwan, 2021, Kejaksaan Harus Berhati-hati Melakukan Penyitaan
Aset Kasus Jiwasraya Asabri,
[https://www.suara.com/bisnis/2021/08/03/160436/kejaksaan-harus-](https://www.suara.com/bisnis/2021/08/03/160436/kejaksaan-harus-berhati-hati-melakukan-penyitaan-aset-kasus-jiwasraya-asabri)
berhati-hati-melakukan-penyitaan-aset-kasus-jiwasraya-asabri,
diakses 11 September 2021.

Susilo, Joko, 2021, Dasar hukum pelelangan barang bukti Asabri dinilai
kurang memadai,
[https://www.antaranews.com/berita/2159326/dasar-hukum-](https://www.antaranews.com/berita/2159326/dasar-hukum-pelelangan-barang-bukti-asabri-dinilai-kurang-memadai)
pelelangan-barang-bukti-asabri dinilai-kurang-memadai, diakses 11
September 2021.